

Judul : Ahmad Syaiku : tujuannya baik, tapi waktunya tak tepat  
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 2

## AHMAD SYAIKHU, Anggota Komisi V DPR Tujuannya Baik, Tapi Waktunya Tak Tepat



dirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi, waktunya sangat tidak tepat. Kita harus ingat tentang iuran BPJS yang baru saja naik. Belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik. Kini, rakyat diwajibkan menyisihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen untuk Tapera. Tak terbayangkan betapa nestapanya hidup rakyat.

### Sebaiknya bagaimana?

Fokus pemerintah harusnya pada pangan. Sebab, pandemi ini berpotensi melahirkan krisis ketahanan pangan. Selain itu, ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.

### Lantas, apa yang harus dilakukan?

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-Undang tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya. Selama hampir empat tahun, amanah Undang-Undang tersebut diabaikan, padahal seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit. Namun, tiba-tiba muncul tahun 2020 saat terjadi pandemi corona.

Ini indikasi pemerintah tidak serius membangun rumah untuk rakyat. Kesan untuk mendapatkan dana talangan justru terlihat, akibat penerimaan pemerintah yang anjlok dan defisit APBN kian melebar.

### Bagaimana dengan besaran iuran yang telah ditetapkan dalam PP tersebut?

Skema Tapera mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5 persen. Pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Angka 3 persen yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan.

### Kapan kepesertaan berakhir?

Kepesertaan Tapera berakhir ji-

ka pekerja memasuki masa pensiun; mencapai usia 58 tahun, (syarat khusus bagi peserta mandiri); peserta meninggal dunia; atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta lima tahun berturut-turut.

### Ada beberapa pihak yang menyebutkan, PP Tapera seperti dipaksakan?

Nah, ini juga memunculkan kecurigaan publik. Ada kesan, pemerintah berusaha mencari sumber dana talangan baru, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara. Ini bisa terlihat di Pasal 27 PP Tapera. Dijelaskan, dana iuran dapat diinvestasikan ke surat utang pemerintah. Ini artinya, pekerja diminta secara tidak langsung iuran untuk beli SBN.

### Menurut Anda, kenapa pemerintah melakukan hal ini?

Banyak pihak kemudian menafsirkan, ini dilakukan karena pemerintah sedang cari sumber pembiayaan baru di tengah pelebaran defisit anggaran. Kecurigaan itu semakin kuat, karena ada kebijakan pemerintah dalam penyediaan sumber pendanaan penanggulangan dampak corona.

### Konkretnya seperti apa?

Hal itu bisa dilihat melalui penerbitan surat utang negara (SUN), seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) f Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU. Dan, Pasal 2 ayat (1) e pada perppu yang sama, pada intinya mengatakan bahwa sumber-sumber dana abadi dapat digunakan untuk pendanaan stimulus pemulihan ekonomi usai pandemi corona.

### Berapa uang yang bisa dikumpulkan melalui Tapera?

Berdasarkan simulasi perhitungan Real Estate Indonesia (REI), dengan membayar premi 3 persen dari penghasilan, akan terkumpul dana hingga Rp 134 triliun. Angka ini diperoleh dengan asumsi peserta Tapera diperkirakan mencapai 90 juta. Sedangkan hitungan pemerintah, dengan jumlah iuran sebesar 3 persen, maka dana Tapera yang dapat dikumpulkan per tahun mencapai angka Rp 71 triliun. Sebuah angka yang sangat besar. Potensi dana rakyat hanya untuk jadi dana talangan, sangat terbuka lebar. ■ NNM

### Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Bagaimana tanggapan Anda?

Kita sangat terkejut. Peraturan Pemerintah ini hanya jadi beban baru rakyat saat pandemi corona masih terjadi.

### Beban seperti apa yang Anda maksud?

Di tengah pandemi corona, kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Prediksi Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 0 persen. Asumsi didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan dan masih berlanjut.

Beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

### Apakah PP Tapera tidak tepat dikeluarkan saat ini?

Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP Tapera tak perlu diha-